

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali Zainuddin, 2016, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Allott Anthony, 1981, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review, Indiana.
- Andrianih Aan, 2012, *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, Tesis FH UI, Jakarta.
- Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Terjemahan B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman Lawrence M., 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- HS Salim, Nurbani Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada.cet. ke 3, Jakarta.
- Indrati Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Malangjoedo Soekarsono, 1983, *Algemene Voorwaarden Voor de Uitvoering bij Aaneming van Openbare Werken (AV 41 Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken = SU 41: Syarat-Syarat Umum untuk Pelaksanaan Bangunan Umum yang Dilelangkan*, Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Notohamijoyo O., 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Ramli Samsul, 2014, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2009, *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*, Refika Aditama, Bandung.
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerdjono, 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugono Dendy, et.al, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Sutendi Adrian, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudho W. dan Tjandrasari H., 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, Jakarta.
- Zai Immanuel, 2019, *'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Industri Pilihan di Batam'*, Tesis Universitas Internasional, Batam.

## 2. Artikel Jurnal

- Cahyaningsih Diana Tantri, 2020 *'Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot'*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Mengurai%20Teori%20Efectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Efectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf)

- Chan Albert P. C. dan Owusu Emmanuel K., 2022, *'Evolution of Electronic Procurement: Contemporary Review of Adoption and Implementation Strategies'*, Buildings, <https://doi.org/10.3390/buildings12020198>
- Dimitrova Zornista Kutlina, 2018, *'Government Procurement: Data, Trends and Protectionist Tendencies'*, Trade Chief Economist Notes', Belgium, [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc\\_157319.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157319.pdf)
- Hadiyati Nur, 2018, *'Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang'*, Jurnal Pengadaan Volume I Nomor 2 LKPP, Jakarta.
- Handayani I Gusti Ayu Ketut Rahmi, 2013, *'Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia'*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Jilid 42 Nomor 1, Semarang.
- Mulyono Purnomo Edy, 2017, *'Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik'*, Airlangga Development Journal, Gresik.
- Novita Ria A., Prasetyo Agung B. dan Suparno, 2017, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal Volume VI Nomor 2, Semarang.
- Purwanto, 2009, *'Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement'*, Jurnal Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Vol. 9 No. 1, Yogyakarta.
- Setiadi Wicipto, 2009, *'Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan'*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4, Jakarta.
- Wagiman, 2016, *'Nilai, Asas, Norma dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya'*, Jurnal Filsafat Hukum.

Widoyoko Johanes Danang, 2018, '*Politik, Patronase, dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Wisma Atlet*', Jurnal Integritas Volume 4 Nomor 2, Jakarta.

Yunus Harjito, 2015, '*E-Procurement: Peluang dan Tantangan bagi Pemerintah Daerah*', Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Kudus.

### 3. Artikel dari Situs Web

Abdou A., et. al, 2022, '*International Monetary Fund (IMF) Working Paper: Assessing Vulnerabilities to Corruption in Public Procurement and Their Price Impact*', IMF Working Paper, Washington.

Ashiddiqie Jimly, '*Penegakan Hukum*', [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Evan Stinson, '*Procurement Through Ages*', <https://www.jaggaer.com/blog/procurement-through-the-ages/>

Nolan Mike, '*The History of Procurement: Past, Present, and Future*', <https://www.sourcesuite.com/procurement-learning/purchasing-articles/history-of-procurement-past-present-future.jsp#:~:text=The%20first%20traces%20of%20procurement,suppl y%20for%20these%20massive%20projects>

Varadharajan Dinesh, '*The Evolution of Procurement: Where It Was and Where It Was Going*', <https://www.spiceworks.com/supplychain/procurement/guest-article/the-evolution-of-procurement-where-it-was-and-where-it-is-going/>

### 4. Internet (Website)

Daftar LPSE seluruh Indonesia, <https://inaproc.id/lpse>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/efisien>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/efektif>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/transparan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/buka>

Tesha Dirgantara, 2023

*POLITIK HUKUM PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK (TINJAUAN UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM BERDASARKAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S-2 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

<https://thelawdictionary.org/effectiveness/>

7 Prinsip Pengadaan barang/Jasa, <https://biropbj.ntbprov.go.id/v2/7-prinsip-pengadaan-barang-jasa/>

## 5. Karya Tercetak Pemerintah

Kemendikbudristek RI, 2021, *Kemendikbudristek Berikan Penghargaan Kepada PTN Sebagai Bonus Keunggulan IKU 2021*, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/06/kemendikbudristek-berikan-penghargaan-kepada-ptn-sebagai-bonus-keunggulan-iku-2021>

LKPP RI, 2017, *Pengaturan Harga Katalog Tetap Ikuti Tujuh Prinsip Pengadaan*, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4836>

LKPP RI, 2022, *Laporan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa berkaitan dengan Pengadaan Langsung pada Tahun 2020-2022*, <https://monev.lkpp.go.id/flipbookkl/>

LKPP RI, 2022, *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022*, [https://monev.lkpp.go.id/flipbookkl/flip\\_31Oktober2022.html](https://monev.lkpp.go.id/flipbookkl/flip_31Oktober2022.html),

LKPP RI, 2022, *LKPP Bahas RUU PBJ Bersama Pegiat PBJ dan Akademisi*, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6592>

LKPP RI, 2022, *Peta Persebaran Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa*, <https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/dashboard-jfppbj>

KPK RI, 2022, *Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>

## 6. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang 2011, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Presiden 2010, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Presiden 2012, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Presiden 2016, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Presiden 2020, *Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Presiden 2021, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Keputusan Presiden 2003, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Instruksi Presiden 2015, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Instruksi Presiden 2022, *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Lembaga 2021, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Lembaga 2021, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang*

*Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*, Jakarta.

Indonesia, Keputusan Kepala Lembaga 2020, *Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024*, Jakarta.

Indonesia, Keputusan Direktur Kementerian 2021, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 114/E/KPT/2021 tentang Pedoman Pendanaan Berbasis Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi*, Jakarta.

Indonesia, Surat Edaran Kepala Lembaga 2021, *Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator Dalam Indeks Reformasi Birokrasi*, Jakarta.